

# PERDAMAIAN AGAMA DI NEGERI PLURAL (Studi tentang Praktik Dialog Antar-Agama di Indonesia perspektif Komunikasi Antarbudaya)

Faiz Tajul Millah

## ABSTRACT

*This research aims to examine religious harmony in Indonesia from the end of Soekarno's rule up to the reformasi era, to identify the factors causing the government's failure to keep the religious harmony, and to know how interfaith institutions in Jogjakarta work to create religious harmony in society. This is a descriptive, comparative, and qualitative research because the data are collected from books, documents, and interviews, then used in a comparative analyze.*

*The interfaith institutions examined are limited to only two institutions, Interfidei and FPUB. The research findings show that attempts to realize religious harmony should not be dominated by government, but the role of society itself are very significant. The role of society represented in NGO work is a more bottom-up approach to solve the problems in society. Their work is the antithesis of government approach. However, not all of the interfaith institutions have the same method to work. Although they work based on real problems of society, they use different ways to interact with them. Interfidei and FPUB are examples of this. Interfidei uses a more elite approach to contact with society. FPUB uses a more non-elite approach, based on the grassroots level of society. Those two types of contacts each have strengths and weaknesses, so the two organizations complement each other. The best method would be if there was an NGO that could combine both ways, although it would be very difficult.*

**Key words:** *religious harmony, Interfaith Dialogue*

---

## **A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai bangsa yang plural dari segi etnis, budaya, dan agama. Secara geografis, Indonesia mempunyai lebih dari 13.000 kepulauan dan dihuni oleh lebih dari 200 juta orang. Indonesia terdiri dari 370 suku dan lebih dari 67 bahasa lokal. Sejumlah etnis seperti Melayu, China, Arab, India, dan Negro berkumpul dalam satu kerangka kesatuan politis Republik Indonesia (Achmad, 2001: 95).

Apa yang menarik dan mengesankan adalah bahwa Indonesia dapat tetap mempertahankan kerukunan dan perdamaian dalam kondisi yang plural ini. Bahkan ada beberapa pemikir besar yang tertarik dan terkesan dengan pengalaman tersebut dari bangsa ini. Para sarjana Islam dan Pemikir pluralisme, seperti Fazlur Rahman telah mengungkapkan ketertarikan mereka pada pluralisme Indonesia ini. Rahman memprediksi bahwa Islam yang damai, menarik dan yang mampu membangkitkan nilai-nilai luhur dari toleransi dan moderasi telah muncul di Indonesia. Pemikir lainnya adalah Dr. Lawrence Sullivan, pimpinan dari Pusat Studi Agama-agama Dunia di Universitas Harvard, mengatakan bahwa Indonesia secara kreatif telah merealisasikan sebuah pendekatan baru untuk membuat kehidupan beragama yang harmoni, yang tidak ditemukan di Eropa dan Amerika. Lebih lanjut dia menekankan bahwa Indonesia adalah sebuah model toleransi agama yang negara-negara lain bisa teladani (Shihab, 2001: 335). Akhirnya, delegasi khusus dari Sekjend PBB, Jamsheed Marker, datang ke Indonesia di bulan Maret 1997 dan delegasi ini memberikan pujian terhadap kerukunan kehidupan antar agama di Indonesia. Marker juga menambahkan bahwa kerukunan antar agama di Indonesia adalah sukses dari program pemerintah

melalui departemen agama dalam membuat kerukunan dari kondisi keberagamaan.

B.J. Boland, seorang peneliti tentang isu-isu politik Indonesia, memprediksikan bahwa walaupun Indonesia adalah plural dan dihuni oleh mayoritas Muslim (sekitar 85% dari total penduduk), ini tidak akan mempengaruhi kerukunan hidup di dalam negeri ini. Prediksinya didasarkan atas sebuah evaluasi dari ketentuan prinsip negara Pancasila oleh para pendiri bangsa dan eksistensi dari kementerian agama untuk memediasi dan mengarahkan kerukunan di masyarakat (Boland, 1985: 110-115). Asumsi Boland merujuk pada intrik-intrik politik keagamaan saat itu sebagaimana kelompok-kelompok agama berbeda mencoba untuk membuat suara mereka terdengar. Kemudian, sejarah bisa membuktikan tentang rendahnya tingkat konflik beragama selama periode pasca kemerdekaan, khususnya masa "orde baru". Ini membawa pada asumsi bahwa Soeharto adalah tipe pemimpin yang dapat sukses dalam menjaga dan membangun integritas, kerukunan, dan ketentraman hidup di dalam negeri plural ini. Namun begitu, apabila ini dilihat secara akurat bagaimana Soeharto melaksanakan strateginya dalam menjaga hidupnya negara ini, cocok apabila dikatakan bahwa pada dasarnya kerukunan dan damai yang terjadi hanyalah merupakan "pseudo-harmony." Tekanan melalui kekuasaan dan militer yang diterapkan pada kemungkinan konflik yang bisa terjadi membuat bangsa ini tampak damai tapi potensi konflik yang eksplosif masih tersimpan.

Potensi konflik di Indonesia muncul sebagai fenomena konflik ketika kekuasaan Soeharto berakhir. Protes dan konflik mulai muncul di mana-mana. Retorika keagamaan digunakan dalam berbagai konflik, yang meluas sampai mereka tidak dapat terkontrol lagi. Kasus-kasus seperti Situbondo, Sampit,

Makasar, Maluku, Ambon, Jakarta, Solo dan lainnya menjadi bukti bahwa bangsa ini pada dasarnya tidak siap kehidupan pluralistik baik etnik maupun agama. Terlebih lagi dalam fenomena terakhir kekerasan telah dianggap sebagai solusi akhir dalam banyak kasus. Bom Bali yang diikuti dengan bom-bom lainnya, khususnya bom Marriot, telah menyebabkan keributan tidak hanya di negeri ini saja tapi juga di tingkat internasional. Konflik antar suku di Irian Jaya terjadi akibat upaya pembuatan propinsi baru. semua kasus ini membuat citra bangsa ini yang cinta damai dan harmoni berubah 180 derajat. Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimana upaya untuk membuat bangsa ini mengerti cara untuk hidup secara damai dalam konteks masyarakat yang plural.

Pemerintah menyadari kenyataan ini yang mana damai dan rukun adalah terletak baik di dalam maupun antara agama-agama. Satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah membangun institusi-institusi pendidikan yang berorientasi terhadap pluralitas etnis dan agama melalui program-program seperti Program Hubungan Antaragama di UIN Suska dan Agama dan Lintas Budaya di UGM.

Berkaitan dengan keberadaan kelompok antariman/agama, kita melihat bahwa banyak kelompok antar agama telah bermunculan dalam dekade terakhir, khususnya ketika konflik utama terjadi 1998-2001. Lembaga-lembaga antar iman yang bekerja di Indonesia mempunyai ruang lingkup yang berbeda dalam bekerja, ada yang lokal, regional, dan tingkat nasional. Beberapa kelompok merujuk pada salah satu agama tertentu, tetapi ada juga yang tidak mengacu pada agama manapun. Hal yang menarik adalah bagaimana masing-masing mereka berjuang untuk kerukunan antar masyarakat dan format atau strategi apa yang mereka gunakan. Namun begitu, akan menjadi terlalu luas untuk membahas tentang semua

pergerakan antar agama di (dalam) penelitian ini. Lagi pula, tidak semua institusi berkonsentrasi secara penuh pada isu kerukunan antar agama/iman. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi hanya pada dua institusi antar-agama yang memusatkan pada isu tersebut di dalam kebanyakan aktivitas dan program mereka dan yang cukup populer di tingkat nasional, terutama di lokal Jogjakarta. Lembaga-lembaga tersebut adalah Interfidei dan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB). Ada asumsi yang mengatakan bahwa Interfidei adalah suatu institusi dialog yang lebih menekankan pada penggunaan aktivitas akademis dalam kebanyakan pemilihan program pekerjaan yang mereka lakukan, sedang FPUB adalah suatu gerakan antar-iman yang menggunakan aksi-aksi non-akademis dan mempunyai pilihan peserta kalangan masyarakat awam dan institusi yang dibentuk sebagai institusi non formal. Maka, dari asumsi ini akan dipahami bahwa Interfidei dan FPUB adalah sangat berbeda dalam tiap-tiap aspek keorganisasian dan gerakan. Penelitian ini di antaranya juga akan menyelidiki asumsi ini. Penelitian ini mengambil konteks historis dan permasalahan kontemporer di Indonesia sebagai titik awal yaitu dengan mencoba mengeksplorasi pertanyaan yang berikut.

## **B. Kerukunan Agama di Indonesia**

### **1. Pendirian Departemen Agama dan Perannya dalam Menjaga Kerukunan Agama**

Pendirian Departemen Agama bukanlah suatu keputusan sederhana pada awal kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu diawali dengan perdebatan dan adu argumentasi antara nasionalis-sekular dan pendukung Negara Islam. Soekarno sebagai pendukung nasionalisme-sekular berbantahan dengan M. Natsir dalam memformat dan memutuskan model dari

negara Indonesia. Melalui pemungutan suara anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Nasionalisme-sekular mendapat jumlah paling besar, dan memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara dengan status nasional-sekular. Namun begitu, tuntutan dari wakil kelompok Islam untuk membangun negara berstatus Islam tidak bisa diabaikan, mengingat kontribusi umat Islam pada proses revolusi kemerdekaan dan dukungan mereka di masa depan masih diperlukan. Penting bagi mereka untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan di samping negeri ini berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, para pendiri bangsa ini mencoba untuk mengakomodasi harapan mereka. Sebagai solusinya, pada tanggal 3 Januari 1946, Kabinet Syahrir mendirikan satu Departemen Agama sebagai hadiah bagi umat Islam dan sebagai bagian dari kebijakan keagamaan dari pemerintah.

Pada awalnya, ada pembahasan tentang apakah kementerian yang baru ini akan disebut dengan kementerian agama Islam atau hanya kementerian agama saja. Akhirnya, diputuskan untuk memilih hanya kementerian agama saja. Pada mulanya, kementerian ini hanya mempunyai tiga tugas atau pekerjaan: pendidikan, penerangan, dan pengadilan. Tetapi akhirnya kementerian ini juga bertugas melayani pemberangkatkan umat Islam ke Makkah untuk berhaji. Semua dari aktivitasnya pada waktu itu hanya dihubungkan dengan urusan agama Islam saja dan bukan untuk mengurus juga urusan agama lainnya.

Oleh karena itu, ada banyak kritik dan keberatan dari non-Muslim terhadap kementerian agama ini. Tentu saja, pada mulanya, kementerian agama telah dibentuk untuk urusan umat Islam. Tetapi akhirnya, kementerian ini juga mempunyai perwakilan dari agama formal lainnya seperti agama Kristen,

Katholik, Hindu dan Buddha. Hingga sekarang, menteri dari departemen ini selalu berasal dari orang Islam, dan umat Islam selalu menjadi bagian yang paling besar. Fakta bahwa Indonesia mayoritasnya adalah orang Islam dan ini juga berarti bahwa mayoritas anggaran dan tunjangan yang diberikan lebih besar kepada urusan agama Islam. Hal ini selalu menjadi suatu alasan untuk kritik dan keberatan dari non-Muslim kepada kementerian ini. Namun demikian, jawaban dan tanggapannya masih sama halnya dengan argumentasinya Wahid Hasyim, yaitu umat Islam adalah mayoritas dan tentu memerlukan sebagian besar pelayanan dan tidak harus diperlakukan sama halnya dengan umat agama lain. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa kementerian agama tidak hanya kepunyaan umat Islam saja tetapi juga kepunyaan umat beragama lainnya (Azra, 1998: 91).

Sesungguhnya, ada juga keberatan dari umat Islam, terutama mengenai kementerian ini selama periode Orde Lama yang telah digunakan sebagai arena untuk menciptakan intrik di antara kelompok umat Islam. Di samping juga, ketidak-profesionalannya menjadi satu perhatian. Sementara itu, kelompok Nasionalis melihat keberadaan kementerian ini overlapping dalam pekerjaan praktisnya dengan kementerian lain. Sebagai contoh, dalam pemikiran tentang pendidikan, termasuk pendidikan agama adalah sesungguhnya dapat ditangani oleh Kementerian Pendidikan. Juga, pertanyaan tentang hukum agama dan pengadilan agama (seperti: hukum keluarga, warisan) dapat dipecahkan oleh negara dengan membuat satu biro khusus yang di dalamnya terdapat pengadilan agama. Sebagai tambahan, kebijakan kementerian ini yang memberi prioritas lebih kepada umat Islam telah dianggap bisa mengakibatkan kecemburuan dan konflik antar agama. (Azra, 1998: 91).

Namun begitu, banyak pemikir moderat berharap kepada kementerian ini untuk bisa berperan menjadi penengah dalam mencegah dan mengatasi ketegangan dan konflik antar para penganut agama. Dalam proses kerja mereka, dalam kerangka tujuan untuk menjadi penengah hubungan antar agama-agama, kementerian agama ini mempunyai tugas penting, seperti membuat regulasi tentang sasaran dari misi keagamaan, lembaga pendanaan asing yang mendukung misi-misi agama, perizinan dalam membangun tempat-tempat ibadah, dan lainnya, yang menyebabkan ketegangan dan konflik antar agama.

## **2. Gerakan Antar Iman dan Dialog Antaragama di Jaman Orde Baru**

Selama masa Order Baru, ada beberapa usaha untuk melakukan dialog antar-agama di Indonesia. Usaha itu dibagi menjadi dua sisi; pertama, dialog yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kedua, dialog yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah.

### *a. Usaha-usaha dari Pemerintah*

Dialog antar-agama di awal pemerintahan Orde Baru digagas oleh pemerintah. Ini dengan alasan bahwa pemerintah perlu stabilitas untuk menegakkan prinsip politik dan ekonominya. Pertama-tama dialog antar-agama yang dilaksanakan adalah suatu pertemuan yang disebut dengan Musyawarah Antar Agama (MWAUB), yang dilaksanakan tanggal 30 November 1967, di kantor Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri oleh para pemimpin agama. Achmad Dachlan, Menteri Agama pada waktu itu, secara langsung memimpin pertemuan tersebut (Azra, 1998: 259).

Dapat dikatakan konflik agama di Indonesia sebenarnya merupakan produk Orde Baru sebab sepanjang era pemerintahan Demokrasi Terpimpin, konflik antar-agama hampir tidak pernah muncul. Bangsa kita sibuk dengan revolusi dan akibat-akibatnya. Selama masa pemerintahan Orde Baru, potensi konflik yang ada selalu ditekan agar tidak muncul ke permukaan demi memuluskan agenda-agenda pembangunan yang telah disusun, tanpa benar-benar memecahkan isu atau persoalan sebenarnya yang terdapat di masyarakat plural. Dengan begitu konflik yang muncul dapat dianggap khas Orde Baru, suatu produk Rezim Suharto dan regulasi-regulasinya. Dialog Antar-Agama di awal era Orde Baru adalah juga khas Orde Baru dalam gayanya, dibuat untuk menciptakan stabilitas yang dangkal agar memuluskan jalannya pembangunan lebih maju, dari pada benar-benar untuk memecahkan isu-isu di masyarakat.

Ini adalah peran dan posisi yang penting dari Departemen Agama dalam menyusun kebijakan agama, termasuk menerima atau menolak keberadaan atau tidak mengakui kelompok agama. Namun begitu, juga ada beberapa kritik dan argumentasi bahwa Departemen Agama perlu meningkatkan peran mereka dalam membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberatan yang meluas terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) mencerminkan bahwa Indonesia perlu bergerak dan berubah. Kebijakan agama di RUU KUB dianggap sama dengan sebelumnya.

Lebih lanjut, pemerintah terus mengatur dialog antar-agama di tingkat nasional. Sering juga dialog hanyalah sekedar formalitas belaka. Dialog yang dilakukan tidak mencoba untuk memecahkan konflik yang terjadi dengan memahami akar konflik itu di masyarakat. Dalam banyak kesempatan,

pemerintah turut-campur dari segi kemiliteran dalam mengurangi ketegangan dan mencegah konflik. Haruslah diakui bahwa dalam jangka pendek intervensi pemerintah melalui beberapa kebijakan, peraturan dan pendekatan militeristik telah berhasil menanggulangi konflik dan ketegangan agama, paling tidak sejauh keberhasilan dari lancarnya pembangunan yang telah dilakukan.

Sejak itu, pemerintah melalui Departemen Agama telah memulai dialog antar-agama dan mempromosikan kerukunan agama. Kementerian Agama yang berikutnya mengadakan aktivitas yang lebih intensif. Sejak saat ini, kemudian dialog antar agama menjadi satu program pemerintah dan suatu program dari proyek utama tentang kerukunan agama dari Departemen Agama. Mungkin ini satu-satunya program departemen yang terus menerus secara konsisten dalam waktu yang cukup panjang dan telah melalui berbagai pergantian kepemimpinan. Tampaknya dialog antar agama adalah program wajib Departemen Agama sebagaimana tercermin dalam program-programnya. Usaha KH. A. Dahlan untuk membuat lembaga konsultasi antar agama dilanjutkan oleh Menteri berikutnya, terutama sekali H. Mukti Ali dan Alamsyah Ratuprawira Negara.

Proses tersebut sangatlah penting. Itu dapat dilihat sejak 1961, ketika program perbandingan agama didirikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dan IAIN Jogjakarta. Di kedua kampus tersebut, ada banyak buku-buku yang diwajibkan yang membahas tentang agama, dan workshop yang dibuat untuk membahas seputar persoalan keagamaan. Pengaruh ini berlanjut dengan konferensi agama yang diadakan oleh Balitbang Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (1980an), dan pembangunan beberapa departemen

untuk studi agama di Seminari-seminari. Studi agama menjadi prioritas ketika Mukti Ali menjadi Menteri Agama (1971).

Dalam perspektif Mukti Ali, sebagaimana dinyatakan di atas, studi agama-agama seharusnya mendukung sebuah sikap terbuka pada agama-agama lain dan mendorong kesiapan untuk berdialog. Jadi, dapat dikatakan bahwa studi atau pengantar yang serius pada agama-agama dan keyakinan-keyakinan lain adalah sebuah persyaratan untuk datang dan masuk ke dalam dialog; yakni proses “pre-dialog.”

Dalam kesimpulan dari sebuah artikel, Mukti Ali menegaskan bahwa:

Walaupun studi perbandingan agama di Indonesia secara teoretis belum terbangun dengan baik, tapi dalam kehidupan praktis, keberadaan studi perbandingan agama adalah sangat membantu dalam kelancaran proses dari dialog antar agama di Indonesia. Ini mungkin sebab dari kepandaian bangsa Indonesia dalam membuat semua hal menjadi relatif (Ali, 1990: 3-11).

Mukti Ali juga telah mengatakan di permulaan dulu, studi perbandingan agama yang kita dirikan di Indonesia sebab kondisi dari kehidupan beragama di Indonesia (khususnya Islam) telah masuk ke dalam dunia pemikiran teoritis dan menjadi terbuka supaya terbebas dari hanya semata-mata pemahaman yang normatif dan berorientasi semata-mata pada mistisisme. Lebih lanjut dia menunjuk pada sebuah model akademis dari studi agama yang harus menjadi lebih lama dan ketat apabila berharap agama-agama bisa keluar dari kepicikan berpikir, yang menjadi sebuah halangan untuk mengenal agama-agama dan keimanan lainnya secara obyektif. Jadi, sejujurnya dibutuhkan untuk masuk ke dalam proses pemikiran kritis Barat. Kemudian, studi agama-agama yang dia gagas harus mengikuti metodologi yang ketat seperti pendekatan para pemikir *religionswissenschaft* Jerman, Joachim

Wach, yaitu, studi agama-agama seharusnya obyektif dalam metode dan pengenalan proses untuk menelaah diri kita dan yang lainnya.

Di masa Orde Baru secara umum, dapat dilihat bahwa salah satu aktivitas atau regulasi pemerintah yang terkait dengan agama adalah “proyek kerukunan”. Telah umum diketahui bahwa pemerintah menjadikan Departemen Agama sebagai agen penyelenggara dari “proyek” itu. Departemen ini melakukan dan menggagas dialog antar agama dalam lingkup yang sangat luas. Namun begitu, apa yang seharusnya diperhatikan adalah bahwa hasil dari dialog tersebut tidak mencerminkan kemauan dari berbagai elemen masyarakat ataupun menyentuh problem nyata dari masyarakat.

Dialog-dialog yang dilakukan bukanlah dialog atas persoalan-persoalan aqidah atau dogma dari setiap agama. Tetapi lebih pada mendiskusikan isu-isu seperti bagaimana masing-masing agama memotivasi para penganutnya untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Ini jelas bahwa aktivitas dialog terkait dengan program pemerintah, yakni untuk menciptakan situasi yang kondusif pada program-program pembangunannya. Diharapkan juga oleh pemerintah bahwa dialog dalam sebuah forum seperti Musyawarah Antar Umat Beragama tidak akan menjadi sebuah arena konflik sebagaimana yang terjadi di tahun 1967. Seringkali dialog yang dilakukan oleh pemerintah untuk bertemu dan berbicara tentang persoalan-persoalan dalam pandangan pemerintah, seperti persoalan tentang tuntutan implementasi hukum Islam dan persoalan misionaris Kristen yang mencoba untuk mengkristenkan umat Islam. Persoalan-persoalan ini biasanya diatasi dengan model legalistik seperti keputusan Menteri Agama No. 70/1978 tentang Misi Keagamaan. Dengan kata lain, persoalan yang ada didekati dengan mengajukan sebuah

kode etik tentang hubungan antar agama. Dengan cara yang lebih kasar, dapat dikatakan bahwa dialog yang digagas dan dilakukan oleh pemerintah masih merupakan sebuah pertemuan elit keagamaan yang mencoba untuk mengamankan proyek utama dari pemerintah Orde Baru, yakni program-program pembangunan. Pemerintah Orde Baru merasa bahwa pembangunan bangsa ini tidak boleh ditunda, dan pembangunan harus berlangsung dengan baik. Pembangunan menjadi sebuah tuntutan dari segenap masyarakat, sehingga pembangunan harus mendapatkan basis yang mapan dan semua orang harus terlibat dalam kesuksesan dari pembangunan tersebut.

Ketika Alamsyah menjadi Menteri Agama di tahun 1970, institusi yang dibentuk dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) adalah hasil pertemuan dari para pemimpin keagamaan dan pejabat Departemen Agama pada 30 Juni 1970. Ini dapat dilihat sebagai embrio pertama dari institusi antar agama di Indonesia.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, pemerintah mempunyai konsep sendiri tentang kerukunan agama. "Trilogi kerukunan" populer pada saat itu. Kerukunan antar-agama, intra-agama, dan antara agama dengan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan trilogi kerukunan tersebut, pemerintah buat peraturan yang mengatur kehidupan beragama. Peraturan dibuat didasarkan pada asumsi bahwa Negara, dengan Pancasila sebagai prinsipnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kerukunan agama. Dalam menciptakan kerukunan agama, pemerintah memilih kebijakan pencegahan dengan prinsip memberi prioritas pada kepentingan nasional lebih dari kepentingan individu atau kelompok. Sebagian dari peraturan adalah:

- Untuk menciptakan satu Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) melalui Kementerian Agama (MENAG) keputusan No. 35, 1980.
- Pelaksanaan dari penciptaan kerukunan hidup beragama di daerah terkait dengan WMAUB yang telah dibentuk sebelumnya dengan memberi dasar hukum instruksi MORA No. 3, 1981.
- Membuat tim koordinasi pengawasan terhadap masyarakat beragama melalui keputusan Kejaksaan Nasional No. 108/J/A/5/1984.
- Kebijakan kelompok-kelompok agama melalui Instruksi MORA No. 4, 1978.

Usaha pemerintah untuk menciptakan kerukunan agama, sebagaimana tercermin dalam peraturan di atas, telah mendapatkan kritik dari beberapa pemikir. Mereka cenderung melihat bahwa yang pemerintah usahakan tidaklah efektif dan bahkan menjadi kontra-produktif. Menurut pendapat St. Sunardi, gaya hubungan antar-agama yang dikembangkan oleh Pemerintah Orde Baru yang didasarkan pada dua asumsi, tidaklah cukup realistis dan benar. Pertama, tugas hubungan antar-agama adalah di tangan para pemimpin agama, dan kedua, tugas termasuk dalam memberikan perlindungan pada para penganut agama dan jumlah yang meningkat dari tiap pengikut agama. Dalam kata lain, model komunikasi antar-agama direduksi hanya pada penyebaran agama dan rasa damai dan rukun juga direduksi pada ketidak-adaan konflik dari pada rasa tanggung jawab dari semua orang (Sunardi, 2001: 56).

Menurut pendapat Gus Dur, kegagalan Orde Baru disebabkan oleh konsep kerukunan yang dikembangkan oleh Orde Baru sendiri. Menurutnya:

Kita sebenarnya belum mempunyai program di skala nasional untuk mempunyai kesaling-pemahaman dan kebersamaan atau solidaritas antar-agama. Apa yang ada dalam pemerintah Orde Baru adalah satu program toleransi dan pertimbangan timbal balik. Apa yang nampak dari istilah yang dibuat oleh pemerintah sungguh sesuai dengan kondisinya : kerukunan antar-agama. Ini berarti bahwa hanyalah rukun saja. Kerukunan berarti hidup bersama dengan tenang: hidup dalam lingkungan pertetanggaaan yang damai tetapi tidak benar-benar ada kesaling-pengertian antar kelompok, padahal rasa kesetiakawanan dan kesaling-pengertian antar-kelompok yang perlu untuk dikembangkan.

Walaupun regulasi telah berlaku, namun masih tetap ada beberapa ketegangan dan konflik yang terjadi di tingkatan akar rumput, terutama yang terkait dengan missionarisasi keagamaan, membangun tempat beribadat, dan sebagainya. Ini muncul karena banyak faktor, seperti peraturan di atas tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk kepada para pemimpin agama dan para tokoh masyarakat. Usaha tersebut kurang efektif sebab mereka masih diorientasikan untuk memelihara stabilitas dan kesatuan nasional, sehingga hubungan antar-agama tidaklah bermanfaat atau efektif.

Di samping itu, peran institusi keagamaan membuat kebijakan yang dibuat justru memperburuk hubungan antar-agama di masyarakat. Suatu contoh adalah kebijakan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tahun 1987 yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada tetangga atau teman yang beragama Kristen dan sebaliknya. Di saat sekarang ini, kebijakan tersebut menjadi tidak hanya tidak efektif dalam menciptakan kerukunan agama, tetapi bahkan kontra produktif.

### **3. Usaha Lembaga Antar Iman dalam Menciptakan Kerukunan Agama sebagai Antitesis dari Usaha yang Dilakukan Pemerintah**

Pada awal 1990an, dialog antar-agama juga diselenggarakan oleh beberapa kalangan organisasi non-pemerintah. Ini berarti prakarsa untuk dialog tidak berasal dari pemerintah, tetapi telah diaktifkan dan diselenggarakan oleh masyarakat baik secara formal dalam institusi formal /LSM ataupun organisasi non formal seperti forum atau komunitas.

Sebagian dari kelompok ini bergerak di Jogjakarta, seperti Dialog Antar Iman (DIAN/INTERFIDEI), yang didirikan tahun 1992, yang mana fokus aktivitasnya pada upaya untuk mengembangkan kesadaran pluralisme dan sosialisasi tentang dialog antar-agama kepada masyarakat, terutama di lingkungan generasi muda. Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) yang didirikan tahun 1995, melibatkan anggota dari para pemimpin dan figur dari tiap agama dan iman. Mereka berniat untuk memasyarakatkan kesadaran dialog antar-agama pada masyarakat terutama di tingkat akar rumput. Di tingkat generasi mudanya, ada komunitas Tikar Pandan (embrionya muncul tahun 1995), di mana sejumlah pemuda antar agama dan antar etnik di Jogjakarta melakukan dialog secara intensif. Mereka memegang idealisme untuk menjadi masyarakat yang agamis secara matang. Mereka perhatian dengan pencarian solusi untuk mengatasi prasangka antar agama dan etnis. Fokus mereka adalah pada diskusi berkala dan berbagi pengalaman keagamaan, dan mereka juga mempunyai aktivitas unik seperti eksplorasi tradisi kesukuan dan keberagaman yang berbeda. Ada juga Lembaga Lintas SARA (LLS) berdiri tahun 1996 sebagai kelanjutan dari kelompok Lintas SARA yang diikuti oleh beberapa siswa dari organisasi kesiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Indonesia

Islam (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMKI, PMKRI, dan seterusnya. SARA adalah istilah singkatan dari Orde Baru untuk suku, agama, dan ras, dan pembagian antar kelompok.

Di tahun 1990-an, pendekatan-pendekatan yang lain juga bermunculan sebagai reaksi atas program dialog antar-agama yang telah diaktifkan oleh pemerintah. Pendekatan non-pemerintah ini, kata St. Sunardi, adalah pendekatan dialog antar-agama sebagai kritik sosial. Hampir semua institusi ini dipelopori oleh para pemikir muda yang prihatin dengan peran agama dalam iklim demokrasi dan keadilan sosial. Di antara mereka adalah Gus Dur, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Rm. Mangunwijaya, Rm. Banawiratma, Th. Sumartana dan Eka Darmaputra. Gus Dur, sebagai contoh, mendirikan FORDEM yang mempunyai beberapa anggota intelektual berasal dari beragam latar belakang. Diharapkan agar gerakan antar-agama tersebut akan terintegrasi dengan pergerakan sosial baru yang berkembang saat itu (Sunardi, 57-58).

Mengacu pada model dialog antar-agama, kelompok ini merealisasikan dan mengembangkan banyak model dialog, terutama mengenai dialog teologi dan aksi. Mereka betul-betul menyadari bahwa dialog antar-agama harus dilaksanakan pada semua tingkatan masyarakat, tidak hanya di tingkat elite masyarakat atau elite agama, tetapi juga dengan rakyat dan masyarakat pada umumnya. Bagi mereka permasalahan teologi keagamaan itu bisa dibicarakan dan dibahas secara terbuka. Disamping pula, mereka juga menekankan pentingnya bekerja sama secara nyata di masyarakat sebagai perwujudan dialog.

### **C. Dialog Antar Iman dan Praktiknya di Dunia LSM (Dialog Agama Belajar dari Pengalaman Interfidei dan FPUB)**

Sebagaimana terlihat dari latar belakang, visi dan misi, pendekatan, jaringan, funding, dan program dari Interfidei and FPUB, maka kedua organisasi tersebut dapat dianalisis dengan model analisa perbandingan atas pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini. Pertanyaan yang akan dianalisa disini ada empat kategori: (a) kontinuitas dan konsistensi lembaga dalam usaha dan cita-citanya untuk menciptakan kerukunan agama, (b) tingkatan pendekatan keakademikan dan non-akademik yang mereka gunakan, (c) tingkat kemandirian dan ketergantungan lembaga terhadap organisasi lainnya, dan (d) keefektifan dan ruang lingkup dari lembaga tersebut.

Maka dari jawaban atas empat pertanyaan di atas, bisa disimpulkan bahwa diantara kedua lembaga tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan Interfidei dan FPUB kebanyakan disebabkan oleh maksud mereka untuk bekerja dalam kaitan dengan persoalan sosial keagamaan masyarakat. yang didasarkan pada situasi nasional dan lokal negeri ini, kedua-duanya berusaha untuk membangun institusi antar-iman dengan dialog secara umum sebagai utama alat dan metode kerjanya. Walaupun format Interfidei dan FPUB berbeda, sebagai institusi dan forum, namun ini tidak membedakan fungsi mereka, yaitu untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa ini ke arah damai, rukun dan hidup secara lebih baik. Namun begitu, perhatian ini tidaklah dianggap cukup luas. Bahkan beberapa pemikir seperti St. Sunardi berkata bahwa untuk membuat institusi antar-agama yang mempunyai kaitan dengan dialog agar peran mereka menjadi lebih penting di masyarakat, dan apabila mereka tidak ingin diabaikan dan dianggap tidak relevan atau tidak penting dalam kaitan dengan kebutuhan hidup sosial yang dinamis, maka mereka perlu meluaskan lingkup misi dan visi mereka.

Dengan didasarkan pada alasan itu kemudian Interfidei dan FPUB mencoba untuk mengkomodasinya dalam visi mereka. Interfidei memandang bahwa masyarakat yang ideal tidak hanya rukun dalam kehidupan beragama saja, tetapi lebih luas dari itu, kerukunan dalam kehidupan *civil society* yang mempunyai kebebasan, hak, dan damai. FPUB memandang masyarakat yang ideal sebagai tidak hanya rukun dalam kehidupan beragama saja, tetapi lebih dari itu, masyarakat majemuk seharusnya damai, interaktif, kooperatif, dan peduli antara satu dengan lainnya berdasar pada iman yang kuat, solidaritas, dan hak azasi manusia.

Sebagai tambahan, apa yang membuat mereka berbeda adalah kesepakatan tidak resmi yang mereka buat. Mereka berdua sepakat untuk berbagi area pekerjaan. Selagi Interfidei memilih tingkatan elite masyarakat seperti para siswa, aktifis, para pemimpin sosial dan agama, FPUB memilih masyarakat akar rumput. Pembagian kerja ini kemudian membuat mereka menjadi sangat berbeda hampir semua bagian dari aktivitas dan organisasi kelembagaan mereka. Di samping visi dan status dari institusi mereka, model aksi, program, divisi kerja, ketergantungan pendanaan, dan lingkup misi adalah juga berbeda.

Model aksi yang digunakan oleh Interfidei adalah akademis. Studi agama-agama, konferensi, training, diskusi buku, workshop, dan penerbitan buku adalah menjadi bagian dari aktivitas akademis ini. Aktivitas ini relevan dengan perhatian dan aktivitas para siswa, aktifis, dan para pemimpin sosial dan agama. FPUB menggunakan model aksi yang lebih non-akademis. Dialog antar-agama atau antar-iman dibuat dalam bentuk seperti dialog karya, sarasehan, berdoa bersama secara kolektif, bersih desa, rembug desa dan seterusnya, upaya membangun perdamaian dibuat seperti mimbar bebas,

kampanye damai, advokasi, pertemuan budaya tidak resmi atau kumpul budaya, pernyataan sikap, dan sebagainya. Semua ini menjadi bagian dari aktivitas yang non-akademis. Aktivitas ini sesuai dengan perhatian dan aktivitas dari masyarakat akar rumput.

Model aksi di atas kemudian mempengaruhi kebutuhan akan funding dalam membiayai program-program yang mereka selenggarakan. Interfidei, yang menggunakan aksi yang lebih formal dan akademis, sering memerlukan dana besar, sebab kebanyakan dari pertemuan-pertemuan formal dan akademis seperti konferensi, pelatihan, workshop, penerbitan, dan lainnya adalah relatif mahal. Oleh karena itu Interfidei sering membutuhkan dana untuk membiayai kebanyakan dari program-programnya dan ini membuatnya relatif tergantung pada ketersediaan dana. Sebaliknya, FPUB tidak memerlukan banyak dana untuk membiayai kebanyakan dari program-programnya. Program-program yang FPUB selenggarakan adalah lebih non-formal sifatnya dan non-akademis. Kebanyakan dari programnya adalah murah. Karena inilah lalu FPUB cenderung menjadi mandiri dan bebas dari campur tangan yayasan pendanaan manapun. Memang FPUB menerima bantuan pembiayaan dari CCFD, tetapi bantuan pendanaan ini adalah baru dan pembiayaan mulai diterima sejak 2003. Namun begitu, FPUB tetap akan mampu menyelenggarakan semua programnya walaupun tidak ada bantuan pembiayaan tersedia sebagaimana halnya waktu sebelumnya.

Sebagai tambahan, model berbeda dari keduanya Interfidei Dan FPUB juga mempengaruhi lingkup program dan misi mereka. Interfidei yang mempunyai peserta lebih elite dari kebanyakan programnya memungkinkannya untuk meluaskan lingkungannya seluas mungkin. Itu karena kontak dengan

masyarakat diwakili oleh sebagian orang. Tetapi FPUB cenderung untuk membatasi lingkungannya hanya untuk area lokal Jogjakarta. Karena lebih sulit bagi FPUB untuk meluaskan lingkungannya lebih luas dibanding Jogjakarta, sebab kontak antara FPUB dan masyarakat secara langsung di tingkat akar rumput. Kontak langsung dengan masyarakat akar rumput berarti bahwa FPUB perlu tahu tentang persoalan-persoalan dan isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Mustahil untuk mengetahui setiap persoalan dan isu yang muncul di setiap area di Indonesia. Oleh karena itu isu-isu yang direspon oleh FPUB adalah isu lokal. Walaupun beberapa isu adalah nasional juga, FPUB mencoba untuk membuatnya sesederhana mungkin sehingga isu tersebut dapat dipahami oleh semua orang.

Memang orang-orang yang hidup dalam kerukunan agama di Jogjakarta melalui periode bergolak di mana ada banyak konflik di lain area di Indonesia adalah juga satu indikator positif mengenai efektivitas program Interfidei dan FPUB. Usaha mereka bukanlah satu-satunya alasan yang mungkin untuk kondisi Jogjakarta; para pengamat sering juga menunjuk pada Etika Jawa, kepada karismatik, kepemimpinan yang dapat menenangkan dan mencegah konflik terjadi dari Sultan, dan pada gaya hidup masyarakat Jogjakarta. Sukar sekali untuk memisahkan berbagai variabel berbeda ini, tetapi sejumlah orang yang dipengaruhi secara langsung atau tidak oleh program Interfidei dan FPUB, apakah dengan menghadiri suatu kegiatan, mendengarkan radio masyarakat, atau membaca suatu buku atau majalah, menyiratkan bahwa Interfidei dan FPUB telah sukses menyebar-luaskan gagasan-gagasan kepada pendengar yang lebih besar dan luas.

**Perbedaan antara Interfidei dan FPUB**

<b>INTERFIDEI</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>FPUB</b>
Institusi Resmi, terorganisir dengan baik	Status Kelembagaan	Institusi Non-formal (only forum), tidak cukup terorganisir dengan baik
To develop civil society	Visi	To develop peaceful, non-violent society, and human right
Pluralisme, dialog antar-iman dan kerjasama antar-iman, dan transformasi keagamaan	Misi	To disseminate peaceful spirit, to empower people and advocating, and to promote the non-violent community
Tingkat Masyarakat Elite (mahasiswa, akademisi, agama dan masyarakat)	Target program	Tingkatan Masyarakat Akar Rumput
Formal, akademis	Model Aksi	Non-formal, non-akademis
Lokal dan nasional	Lingkup misi dan program	Terbatas hanya pada masyarakat lokal Jogjakarta
Kebanyakan bergantung pada lembaga pendonor	Kemandirian funding	Lebih bebas dan mandiri

**Persamaan antara Interfidei dan FPUB**

1. Keduanya menggunakan metode utama, yaitu dialog dalam model yang luas dan beragam untuk menyelenggarakan sebagian besar dari program-program mereka
2. Keduanya bekerja sebagaimana kerja LSM, yang mempunyai akses secara langsung kepada masyarakat dan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyebabkan intervensi

- berlebihan pada kehidupan sosial
3. Keduanya mempunyai keunikan masing-masing dari konsistensi visi, misi, dan program, dan dari kontinuitas dalam menciptakan kerukunan agama
  4. Keduanya mempunyai kesamaan dalam keefektifan kerja
  5. Keduanya menggunakan nilai-nilai agama dan etika untuk merespon isu-isu agama, politik, dan sosial
  6. Keduanya tidak memberi prioritas pada agama atau iman tertentu, tetapi meletakkan agama secara sama dan setara

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk mengingat dan mendorong kehidupan beragama yang plural di Indonesia. Pluralitas kehidupan beragama ini telah diwariskan sejak awal sejarah Indonesia. Sejak permulaan Indonesia, dari jaman ketika daerah ini masih diperintah oleh kerajaan, sampai hari ini kehidupan plural ini masih tersisa dan tidak pernah berakhir. Pluralitas ini tidak bisa dihindarkan dan harus diterima. Benar bahwa, sebagaimana sering dikatakan, pluralitas ini menyimpan potensi konflik, tetapi konflik itu tidaklah perlu terjadi. Apa yang bangsa Indonesia, dan setiap individunya, harus lakukan adalah bagaimana cara mengatur, atau saling berhubungan dengan kondisi yang plural ini demi mencapai atau memelihara kondisi yang kita inginkan bersama.

Mengelola pluralitas kehidupan beragama menjadi bagian dari pengalaman Jaman Orde Baru, sebagaimana diuraikan di atas. Pemerintah mencoba untuk menciptakan kerukunan agama dengan peciptaan proyek kerukunan agama yang dikembangkan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Dari awal pemerintahan Soeharto sampai akhir rejimnya, proyek tersebut masih tersisa. Proyek menjadi suatu tradisi yang berlanjut dari satu menteri kepada yang berikutnya.

Interfidei dan FPUB adalah dua institusi antar-agama terutama bekerja demi tujuan ini. Didasarkan pada pluralitas dan pemahamannya tentang pluralisme, Interfidei mengembangkan institusi yang dinamai dengan Dian/Interfidei. Sejak tahun 1992, ketika Interfidei secara formal dibentuk, ia bekerja dan mengadakan banyak program yang mendorong pengembangan kerukunan agama di masyarakat. Tidak seperti Interfidei, FPUB dibentuk bersamaan dengan kondisi konflik tahun 1996. Inilah sebabnya kenapa FPUB membuat program dan institusi berdasar pada konsep persaudaraan sejati demi mendorong pengembangan kerukunan agama di masyarakat. Oleh karena mereka berangkat dari latar belakang berbeda, mereka cenderung untuk terpisah satu sama lain. Interfidei cenderung untuk mengadakan program yang menonjolkan keikutsertaan dan tindakan akademis-elite, sedangkan FPUB cenderung untuk membuat program dan aksi yang non-akademis atau tingkat akar rumput. Interfidei mengembangkan jaringan untuk menjalankan banyak program dengan banyak kelompok lain di tingkat nasional dan internasional, sedang FPUB cenderung untuk membatasi lingkup dan pekerjaannya hanya di area Jogjakarta dan sekitarnya. Sebagai konsekwensinya, Interfidei memerlukan sejumlah besar pembiayaan untuk membiayai kebanyakan dari program-programnya. Hal inilah yang kemudian membuat Interfidei lebih tergantung pada funding yang tersedia, sedang FPUB tidak tergantung pada dana besar untuk menjalankan program-programnya.

Namun demikian, keduanya mempunyai persamaan dalam kesinambungan atau konsistensi dari institusi mereka dan efektivitas dari program mereka dalam mendorong pengembangan kerukunan antar-agama dalam kehidupan sosial. Adalah mustahil untuk menjamin bahwa tidak akan ada

lagi konflik antar-agama di negeri ini, tetapi paling tidak kesadaran damai dan rukun dalam kehidupan antar-agama akan terbangun dan tersebar luas dari waktu ke waktu kepada seluruh masyarakat negeri ini. Masyarakat Indonesia menantikan Jogjakarta untuk metode dan gagasan intelektual yang baru untuk menciptakan perdamaian dan kehidupan bersama. Keduanya Interfidei dan FPUB, dengan strategi berbeda mereka, dapat menyediakan model bagi kelompok-kelompok lain di seluruh negeri dalam bekerja demi tujuan yang sama di seluruh Indonesia. Jika institusi seperti Interfidei terus berkembang, dan institusi seperti FPUB tumbuh di tiap-tiap daerah di negeri ini, maka itu akan mendorong kearah kondisi di mana orang-orang dapat hidup dengan damai, dan kerukunan sejati akan terbangun di negeri ini.

#### Daftar Kepustakaan

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Jogjakarta: IFFA Press, 1998
- Achmad, Nur, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, Kompas, Jakarta, Agustus 2001
- Ali, Mukti, *Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan*, INIS, Jakarta, 1990
- Azra, Azyumardi, *Islam and Christianity in Indonesia: the Roots of Conflict and Azra, Azyumardi (ed), menteri-menteri agama RI, Biographi social-politik*, INIS, Jakarta, 1998
- Joseph A. Camilleri, (ed.), *Religion and Culture in Asia Pacific: Violence or Healing?* Melbourne: Bista Publications, 2001

- Shihab, Alwi., *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, Juni 2001
- Balitbang Depag, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, sixth edition, Jakarta: Balitbang Depag, 1997
- Burhanuddin, et al. (ed.), *Sistem siaga Dini*
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, Terjemahan, Grafiti Pers, Jakarta, 1985
- Hairus Salim, *Majalah Basis No.01-02*, 53th year, January-February 2004
- Hamidi Jazim, S.H., M. Hum., *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Jogjakarta, 2001
- Madjid Nurcholis, et al., *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, editor: Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF. Jakarta: Gramedia & Paramadina, 1998
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, third edition
- St. Sunardi, *The Dead End of Religious Dialog in Indonesia*, in *Interface*, Vol. 4, No. 1, May 2001
- Suhadi, *Sharing Pengalaman Mengelola Kelompok Antariman: Komunitas Tikar Pandan*, in *Newsletter Interfidei*, special edition, 2002
- Syafa'atun Elmirzana, et al., *Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama Antariman*, Jogjakarta: DIAN/Interfidei, 2002
- Trisno S. Sutanto Dkk. (ed), *Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah*, MaDIA, Jakarta, December 2001